

NASIONALISME MASYARAKAT DI PERBATASAN LAUT: STUDI KASUS MASYARAKAT MELAYU-KARIMUN

Cahyo Pamungkas

*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
E-mail: cahyopamungkas_lipi@yahoo.com*

Diterima: 24-7-2015

Direvisi: 4-8-2015

Disetujui: 25-8-2015

ABSTRAK

Tulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut. *Pertama*, mendeskripsikan upaya pemeliharaan rasa kebangsaan yang telah dilakukan negara terhadap masyarakat perbatasan. *Kedua*, mengkaji sejauh mana masyarakat perbatasan mempunyai pengetahuan tentang negara dan perbatasan. *Ketiga*, melihat sejauh mana masyarakat perbatasan memiliki kebanggaan nasional dan memaknai nasionalisme. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari wawancara, diskusi kelompok terbatas, pengamatan terlibat, dan studi literatur yang dilakukan di Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Batu (Kabupaten Karimun). Temuan dalam studi ini sebagai berikut. *Pertama*, penguasaan pengetahuan terhadap NKRI sebagai konsepsi politik serta kebanggaan nasional masyarakat perbatasan pada masa kini semakin meningkat karena perkembangan teknologi informasi dan upaya pemeliharaan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Pemerintah. *Kedua*, nasionalisme yang didefinisikan oleh negara, yang diukur dengan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, kurang relevan dengan konteks sosial ekonomi masyarakat perbatasan yang masih hidup dalam keterbatasan. *Ketiga*, upaya pemeliharaan rasa kebangsaan dapat dilakukan dengan mengakomodasi dan memberikan ruang bagi perkembangan identitas dan kebudayaan masyarakat perbatasan dalam bingkai rumah Indonesia.

Kata kunci: perbatasan, nasionalisme, upaya pemeliharaan nasionalisme, makna nasionalisme.

ABSTRACT

This article aims to describe several efforts by the national government to maintain a sense of nationhood toward boarder communities. Also this articles is addressed to find out the knowledge of boarder communities about Indonesian state, national pride and the meaning of nationalism. The main sources of data are the result of interviews, focus group discussions, participant observation, and literature study conducted in Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Finding of this research show the following phenomenon. Firstly, the national pride and understanding of knowledge about Indonesian state as political conception among border communities today increase because of the development of information technology and the maintenance of national awareness efforts by the national government. Secondly, state-defined nationalism, as shown by the understanding of the concept of nationalism, is less relevant to the socio-economic context that exist in the boarder areas. Thirdly, the effort to maintain nationalism has been conducted by providing a space for boarder communities to develop their cultural identity in the house of Indonesia-ness.

Keywords: borders, nationalism, nationalism maintenance effort, the meaning of nationalism.

PENDAHULUAN

Studi tentang nasionalisme masyarakat perbatasan telah banyak dilakukan dan kebanyakan studi-studi tersebut menekankan relasi antara nasionalisme dan kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan. Misalnya, studi Nilasari dkk. (2014), yang mengkaji film mengenai daerah

perbatasan di Kalimantan Barat. Hasil kajian itu memperlihatkan bahwa tataran ideologis nasionalisme di perbatasan terletak pada bagaimana masyarakat setempat berjuang melawan kemiskinan dan keterpinggiran, baik secara sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. Studi lainnya, disertasi Rarahita (2013), dengan menggunakan

analisis semiotik, menjelaskan bahwa masyarakat perbatasan di Kalimantan Timur masih memiliki rasa cinta tanah air walaupun hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang masih memprihatinkan. Studi tersebut menyarankan agar pemerintah dapat menjadi contoh kekuatan nasionalisme dan menghargai masyarakat yang telah mengharumkan nama bangsa.

Sementara itu, studi yang dilakukan Bakker (2012) dan Noor (2013) menguraikan upaya pemeliharaan rasa kebangsaan masyarakat perbatasan. Studi Bakker dilakukan di perbatasan Indonesia-Timor Leste, sedangkan studi Noor dilakukan di perbatasan Indonesia-Malaysia. Studi Bakker menguraikan pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan nasionalisme pemuda perbatasan. Sementara itu, studi Noor menjelaskan bahwa eksistensi kedaulatan negara bergantung pada sejauh mana negara mampu memelihara rasa kebangsaan dengan baik. Semakin besar kemandirian dalam pengelolaan rasa kebangsaan itu, semakin berdaulatlah sebuah negara. Sebagaimana studi Bakker (2012) dan Noor (2013), tulisan ini juga bertujuan untuk menggambarkan upaya pemeliharaan rasa kebangsaan yang telah dilakukan lembaga-lembaga negara dalam konteks menjaga kedaulatan nasional. Berbeda dengan studi tersebut, artikel ini akan mendeskripsikan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan masyarakat perbatasan mengenai negara Indonesia dan batas-batas geografisnya. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kesenjangan antara pengertian nasionalisme yang didefinisikan oleh negara dan nasionalisme yang dimaknai oleh masyarakat perbatasan.

NASIONALISME DALAM PERSPEKTIF SOSIAL

Memahami nasionalisme di daerah perbatasan menjadi relevan mengingat batas-batas negara poskolonial pada umumnya tidak hanya membelah etnisitas yang berbeda, tetapi juga membelah etnik yang sama karena sejarah kebangsaan yang berbeda dimiliki warga etnis yang sama (Tirtosudarmo, 2005, 1). Garis perbatasan negara tidak selalu mengikuti garis pemisah antara wilayah kebudayaan, bahasa, suku bangsa, atau satuan

ekonomi yang berbeda (Lapian, 2009; cf. Ulaen dkk., 2012, 61). Dengan kata lain, suatu entitas kebudayaan dapat dipisahkan oleh garis perbatasan negara menjadi dua entitas politik yang berbeda negara. Hal tersebut berbeda dengan nasionalisme di Eropa yang melahirkan sejumlah negara-bangsa dengan batas-batas teritorial yang sebangun dengan batas-batas suku bangsa. Proses kolonialisme telah berperan dalam menyebarkan konsep negara-bangsa seperti ini. Bertolak dari realitas di Eropa tersebut, muncullah pandangan Wadley (2002) dan cf. Tirtosudarmo (2005) bahwa batas negara ialah sebuah garis yang memisahkan sistem sosial yang berbeda dan daerah perbatasan menjadi wilayah marginal yang legitimasinya tergantung kebijakan pemerintah pusat. Perspektif ini mengasumsikan suatu proposisi yang mungkin keliru bahwa tingkat nasionalisme di daerah perbatasan lebih rendah daripada di pusat.

Nasionalisme dalam studi ini lebih dimaknai dalam perspektif psikologi sosial, yakni keterikatan terhadap kelompok nasional (*national in-group*) yang terdiri dari perasaan cinta beserta kebanggaan terhadap negaranya tersebut; dan pandangan seseorang bahwa negaranya lebih kuat dibandingkan negara lain (Coenders, 2001, 64). Pandangan ini berakar pada konsep Adorno (1969) yang menganggap bahwa nasionalisme dapat dibedakan menjadi patriotisme dan pseudo-patriotisme. Menurutnya, nasionalisme adalah “*blind attachment to certain national cultural values, uncritical conformity with the prevailing group ways, and the rejection of other nations as out-groups*”. Studi-studi nasionalisme kontemporer dalam perspektif sosiologi di Eropa sudah banyak dilakukan, misalnya Kleinpenning & Hagendoorn (1993), Todosijevik (1998), Coenders (2001), dan Lactheva (2010). Mereka secara garis besar menggunakan nasionalisme untuk melihat fenomena romantik nasionalisme dan chauvinisme di negara-negara Eropa. Berbeda dengan studi-studi tersebut, tulisan ini hanya akan melihat nasionalisme di Indonesia dalam perspektif romantisme masa silam (*romantic nationalism*), yang dimiliki warga masyarakat di perbatasan maritim.

Konsep nasionalisme dalam penelitian ini, dipahami secara teoretis sebagai pengetahuan, perasaan, dan praktik-praktik sosial mencintai tanah air, mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Aspek kognitif ialah pengetahuan tentang Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki batas-batas geografis dan politik. Aspek afektif adalah perasaan sebagai warga bangsa Indonesia. Sementara itu, aspek perilaku adalah praktik-praktik menanamkan rasa nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh negara.

Asumsi yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa nasionalisme yang didefinisikan oleh negara dapat dilihat dalam pengetahuan, perasaan, dan praktik-praktik pemeliharaan rasa kebangsaan. Namun, pemahaman dan praktik-praktik sosial yang dilakukan oleh warga perbatasan sering kali berbeda dengan semangat kebangsaan yang dikonstruksi oleh negara. Dengan demikian, diduga masih ada kesenjangan antara wawasan kebangsaan dan makna kebangsaan yang direpresentasikan oleh praktik-praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah perbatasan. Merujuk pada tulisan Ben Anderson (1991), nasionalisme lebih dipahami sebagai komunitas politik terbayang. Sering kali nasionalisme tidak menemukan relevansi dan gagal dimaknai oleh masyarakat yang membayangkan ketika dihadapkan dalam konteks ekonomi, politik, dan sosial budaya. Wawasan kebangsaan sebagai upaya pemeliharaan rasa kebangsaan belumlah cukup untuk menanamkan rasa nasionalisme. Lebih dari itu, harus ada keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama.

PENGETAHUAN TENTANG INDONESIA

Pengetahuan tentang Indonesia mencakup pengetahuan bahwa Indonesia adalah sebuah negara bangsa dengan batas-batas teritorialnya. Merujuk pada studi sebelumnya (Noor 2013, 101), terdapat empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat dianggap sebagai elemen wawasan kebangsaan. Pengetahuan masyarakat mengenai keempat pilar kebangsaan tersebut

termasuk dalam kategori pengetahuan tentang Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa.

Berkaitan dengan pengetahuan mengenai Indonesia, hampir semua informan di Karimun menyebutkan bahwa Indonesia diimajinasikan sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan ditempati oleh berbagai suku bangsa dan agama. Imajinasi kebanyakan informan tentang Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam didasarkan atas realitas di perbatasan Karimun sebagai sumber produksi pertanian dan pertambangan. Pandangan tersebut sejatinya didapatkan dari sosialisasi yang dilakukan oleh institusi pendidikan, terutama berkaitan dengan wawasan keindonesiaan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Temuan ini juga memperkuat studi Bakker (2012) yang menekankan pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen untuk memelihara nasionalisme masyarakat perbatasan.

Pengetahuan tentang keindonesiaan bukanlah hal yang baru bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan. Kebanyakan pelajar SD sudah memiliki pengetahuan mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, lambang Garuda Pancasila, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya. Mereka mampu membedakan antara Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, dan Manila. Namun, dalam menonton siaran radio dan televisi terdapat beberapa kasus yang berbeda. Pada umumnya, orang Melayu di Karimun lebih menyukai mendengarkan radio dan menonton televisi Indonesia, sedangkan warga keturunan Tionghoa lebih menyukai media-media milik Singapura karena media-media tersebut menggunakan bahasa Mandarin. Penguasaan pengetahuan mengenai Indonesia, menurut kebanyakan informan, semakin meningkat dibandingkan dengan tahun 1960-an. Pada masa tersebut, masyarakat perbatasan lebih banyak mengetahui negara tetangga dan menggunakan mata uang negara tetangga, seperti ringgit Malaysia. Ketidaktahuan tentang Indonesia pada masa itu disebabkan oleh keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mereka lebih mengenal Malaysia, Singapura, atau Filipina

yang jaraknya lebih dekat dan terjangkau oleh transportasi laut.¹

Pada masa kini, transportasi udara dan laut relatif lebih baik di perbatasan maritim Indonesia bagian Barat. Namun, sebagian masyarakat belum memiliki sumber dana yang cukup untuk melakukan perjalanan yang melebihi batas provinsi mereka. Orang Karimun pada umumnya mengunjungi keluarganya di Batam atau Tanjung Pinang. Masyarakat yang memiliki akses transportasi kebanyakan adalah para pengusaha yang memiliki bisnis perdagangan antarpulau atau para pejabat pemerintah.

Penguasaan pengetahuan tentang Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan mengenai perbatasan laut. Berdasarkan keterangan sejumlah nelayan tradisional, mereka mengetahui bahwa Indonesia dengan Malaysia dan Filipina secara geografis dibatasi oleh lautan. Namun, kebanyakan perahu para nelayan ini tidak dilengkapi dengan *Global Positioning Satellite* (GPS) sehingga tidak mengetahui secara pasti di manakah letak garis batas laut internasional. Seorang nelayan menyebutkan jika perahunya bertemu dengan rombongan kapal-kapal tanker dapat diartikan bahwa perairan tersebut sudah berada di luar Indonesia.

Para nelayan tradisional ini sering kali dituduh melanggar garis perbatasan internasional (*illegal crossing*) oleh aparat keamanan. Terminologi *illegal* sendiri berasal dari perspektif negara modern yang asing dalam perspektif masyarakat perbatasan. Merujuk pada Tagliacozzo (2005), masyarakat di Karimun sebelum abad ke-19 tidak mengenal konsep perbatasan laut internasional. Pemerintah kolonial Belanda dan Inggris yang menetapkan dan menentukan garis batas internasional antara perairan Indonesia dan Malaysia. Sebelum berdirinya negara kolonial, orang di kedua daerah tersebut secara bebas melakukan aktivitas pelayaran dari wilayah mereka ke pulau-pulau di Malaysia. Pemerintah

kolonial melakukan kontrol terhadap perbatasan laut yang kemudian dilanjutkan pada masa poskolonial. Meskipun Indonesia dan Malaysia telah dipisahkan secara politik, penduduk di ketiga negara tersebut masih tetap menjalankan aktivitas pelayaran internasional sebagaimana telah dilakukan nenek moyang mereka, baik melalui jalur legal maupun ilegal. Pengetahuan tentang negara modern dan nasionalisme pascakolonial tampaknya kurang menemukan relevansinya. Dengan kata lain, telah terjadi kesenjangan dalam pengetahuan tentang Indonesia sebagai negara modern dan praktik-praktik ilegal menyeberangi perbatasan internasional.

Dari sejumlah wawancara, masyarakat perbatasan tersebut mengetahui tentang aktivitas-aktivitas ilegal yang terjadi di laut internasional. Beberapa informan di Karimun menyampaikan berbagai aktivitas penyelundupan melalui garis batas laut internasional. Misalnya, pencurian pasir oleh kapal Singapura yang sering terjadi di perairan antara Pulau Pulau Tokong Hia sampai Pulau Nipah. Pada malam hari, kapal itu akan melalui garis batas laut internasional dan masuk perairan teritorial Indonesia. Kapal patroli laut Indonesia diduga membiarkan kapal itu menyusuri perairan Indonesia untuk mengambil pasir. Muncul dugaan di kalangan masyarakat perbatasan bahwa kapal tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada oknum petugas patroli sebelum kembali ke Perairan Singapura.

Cerita yang banyak dikemukakan oleh sebagian besar informan adalah penyelundupan kayu, ikan, dan BBM dengan modus sebagai berikut. Ikan atau kayu dari wilayah Indonesia dikumpulkan oleh penadah untuk dibawa ke perairan internasional. Kemudian, pengusaha Malaysia atau Singapura membeli ikan tersebut di tengah laut internasional. Kapal-kapal patroli Malaysia atau Singapura yang menjumpai kapal rekanan dari Malaysia cenderung mengizinkan mereka masuk ke perairan Malaysia karena barang yang dibawa bermanfaat. Selain itu, penyelundupan BBM juga sering kali terjadi di Perairan Karimun karena perbedaan harga BBM di Indonesia dan Malaysia. Banyak perahu atau kapal kecil membawa BBM dan menukarkannya dengan sejumlah komoditas. Kejadian seperti ini diduga sering dilakukan oleh

¹ Pada 1945 dan 1946, Orang Sangir dan Mindanao yang melakukan perjalanan dari Sangihe ke Mindanao belum mengetahui bahwa mereka memasuki wilayah negara yang berbeda. Baru pada 1956, Pemerintah Indonesia dan Filipina mengatur kembali lalu-lintas laut untuk pelayaran tradisional melalui *Border Crossing Agreement* (Aswatini, 1995, 36).

perahu-perahu *pompong* dari Indonesia dengan kapal Malaysia.

Becermin dari berbagai aktivitas ilegal yang terjadi di perairan internasional, masalah utamanya bukan tidak mengetahui tentang konsep politik Indonesia (NKRI), garis batas laut internasional, ataupun rendahnya tingkat pemahaman mengenai wawasan kebangsaan. Akan tetapi, peristiwa-peristiwa seperti itu muncul karena kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Perompakan kapal tongkang pembawa batu granit banyak terjadi di Perairan Karimun sebelum tahun 2009. Setelah program *Community Development* atau *Corporate Social Responsibility*, perompakan batu granit di laut Karimun tidak terjadi lagi karena perusahaan batu granit tersebut sudah dijaga oleh masyarakat dan tingkat kesejahteraan di sekitar daerah pertambangan sudah semakin membaik.

Secara umum, jumlah penyelundupan dan perompakan semakin berkurang di perairan Karimun ketika *Free Trade Zone* dibentuk dan diberlakukan di Karimun, Bintan, dan Tanjung Pinang. Barang-barang dari Malaysia bisa masuk ke Indonesia dengan mudah, dan sebaliknya, barang-barang dari Batam, Bintan, dan Karimun dapat masuk ke Malaysia dengan mudah—kecuali barang-barang produksi pangan. Masyarakat yang tinggal di pesisir mengetahui informasi tentang penyelundupan dan perompakan, namun mereka tidak mengaku pada orang luar—terutama bila ditanya oleh instansi pemerintah. Bila mengaku, mereka akan ditekan oleh oknum aparat keamanan.

Pengetahuan tentang perbatasan laut yang lebih memadai dimiliki oleh aparat keamanan. Sebagai bentuk dari rasa kebangsaan, aparat TNI AL, Polisi Perairan, dan Bea Cukai melakukan patroli menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Diakui seorang aparat penjaga perairan, tidak semua garis perbatasan laut Indonesia dengan Malaysia dapat dikontrol karena garis tersebut sangat panjang dari Natuna sampai Aceh. Kalau satu titik sudah dijaga, titik lain terbuka, dan penyelundupan menjadi sangat mudah ketika jumlah kapal patroli terbatas. Ia mengaku masih banyak penyelundupan yang tidak tertangkap daripada yang tertangkap. Kebanyakan pelakunya

adalah warga Indonesia, baik dari Indonesia ke Malaysia maupun dari Malaysia ke Indonesia. Namun diakui bahwa kapal patrolinya belum pernah menangkap warga Malaysia yang masuk secara ilegal di perairan Indonesia. Hal ini tentu saja tidak mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang perbatasan laut orang Indonesia lebih rendah daripada orang Malaysia. Patroli bea cukai dilakukan setiap hari berdasarkan sektor-sektor dari Laut Natuna, melewati Karimun, Batam, sampai Aceh. Patroli dilakukan siang dan malam dan sambung menyambung. Penangkapan pelaku penyelundupan obat terlarang, seperti heroin dari Malaysia dan kayu logging dari Riau ke Malaysia sering dilakukan di Perairan Karimun.

Narasi tentang aktivitas ilegal tentu saja tidak secara langsung dapat dikaitkan dengan rasa kebangsaan. Namun, jika dilihat dalam kerangka ideologi nasional, peristiwa-peristiwa ini dapat diletakkan dalam bingkai upaya pemeliharaan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Masih banyaknya aktivitas ilegal dapat dibaca bahwa pelaku dan oknum penjaga keamanan laut mungkin saja memiliki pengetahuan yang cukup tentang Indonesia, namun belum memiliki rasa dan wawasan kebangsaan dalam makna sejatinya. Bagi para oknum penjaga perairan, membiarkan dan mengizinkan aktivitas ilegal dapat dimaknai sebagai menurunnya rasa kebangsaan karena mereka tidak menjaga kedaulatan negara dalam perairan. Namun, argumen ini sering kali tidak mengena jika ditujukan bagi para pelaku dari kelompok masyarakat bawah. Mereka melakukan tindakan ini karena negara belum sepenuhnya menegakkan kedaulatan dalam bidang ekonomi, yakni meningkatkan kesejahteraan sehingga mereka terpaksa melakukan tindakan ilegal. Dalam hal ini, jika kita menggunakan analisis Marx (1844), rasa dan wawasan kebangsaan haruslah ditempatkan dalam basis infrastruktur material sebagai basis untuk menegakkannya.

KEBANGGAAN NASIONAL

Salah satu aspek nasionalisme adalah kebanggaan akan jati diri bangsa. Bagian ini akan menguraikan sejauh mana masyarakat yang hidup di perbatasan memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang dipahami dalam terminologi

Anderson (1996) sebagai “komunitas politik yang dibayangkan”. Kebanggaan nasional warga di daerah perbatasan muncul sebagai konsekuensi logis keberhasilan negara menyelenggarakan pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama transportasi dan komunikasi (Nainggolan, 2004, 13). Kurangnya pemenuhan kesejahteraan dapat berimplikasi pada menurunnya kebanggaan nasional dan memberikan kemungkinan yang lebih besar terhadap menurunnya ketahanan dalam menjaga keberlangsungan negara bangsa.

Berbagai wawancara dengan informan di Karimun menunjukkan bahwa orang Karimun secara umum memiliki rasa kebanggaan sebagai orang dan warga negara Indonesia. Namun, secara kritis mereka melihat bahwa dari aspek sosial ekonomi dan penegakan hukum, kondisi kehidupan di Malaysia relatif lebih baik daripada di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pandangan sosial ekonomi dan keterikatan dalam entitas politik. Di samping itu, ditelusuri juga bagaimana ikatan kekerabatan antara orang Melayu-Karimun dan penduduk di Malaysia—dengan tidak mengurangi perasaan keterikatan orang Melayu-Karimun secara politik ke negara Indonesia. Bagian ini akan dilengkapi analisis historis tentang pembentukan rasa nasionalisme yang telah mengakar dalam sejarah perlawanan Kerajaan Bintan, Johor, dan Lingga terhadap kolonialisme Portugis, Belanda, dan Inggris.

Terkait dengan kebanggaan nasional, temuan lapangan menunjukkan adanya dualisme pada kebanyakan masyarakat perbatasan. Pada satu sisi mereka bangga sebagai WNI, namun pada sisi lain sering kali mengakui bahwa kondisi Malaysia lebih baik dari Indonesia. Kebanyakan orang Melayu-Karimun yang pernah bekerja di Malaysia merasa bangga sebagai warga Negara Indonesia karena Indonesia adalah negara besar yang tetap bersatu. Namun, diakui bahwa terkait dengan penegakan hukum oleh aparat pemerintah, keadaan di Malaysia lebih baik daripada di Indonesia. Misalnya, polisi Malaysia di Kukup dan Sei Kuning, pulau terluar Malaysia, sering kali menanyakan identitas orang-orang Indonesia.

Sementara itu, polisi di Indonesia jarang menanyakan identitas warga Malaysia di Karimun.

Tingkat rasa kebangsaan yang dimiliki diduga berkaitan dengan tingkat pendidikan. Menurut penuturan camat Kundur, orang Indonesia yang kurang berpendidikan kebanyakan bekerja sebagai buruh kasar atau bekerja di perkebunan kelapa sawit. Mereka kurang peduli terhadap soal harga diri bangsa dan menjaga nama baik Indonesia karena persoalan sehari-hari yang dihadapinya adalah persoalan kerja keras untuk mempertahankan hidupnya di Malaysia dan keluarganya di Indonesia. Berdasarkan pengamatan, kesempatan kerja yang diminati oleh orang Melayu di Karimun antara lain sebagai PNS dan pegawai honorer. Yang lain memilih bekerja pada perusahaan-perusahaan di FTZ Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).

Ada beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa rasa kebangsaan sering kali tidak berhubungan dengan kondisi kesejahteraan. Kebanyakan informan yang pernah mengunjungi Malaysia menuturkan bahwa mereka lebih merasa bangga sebagai warga Negara Indonesia walaupun kehidupan di Malaysia lebih maju. Mereka memberikan metafora tentang nasionalisme, yakni “daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri”. Walaupun lebih dekat dengan Malaysia yang lebih maju, para informan lebih mencintai Indonesia dan merasa bagian dari NKRI. Hal ini karena rasa solidaritas dan kekeluargaan di Indonesia relatif lebih tinggi daripada di Malaysia. Realitas yang membedakan antara Indonesia dan Malaysia adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati aturan, seperti membuang sampah dan menjaga kebersihan. Namun, perlakuan pemerintah terhadap warga tempatan jauh lebih manusiawi di Malaysia dibandingkan dengan di Indonesia. Misalnya di kantor Imigrasi Malaysia, warga Malaysia diberikan prioritas untuk masuk terlebih dahulu. Sebaliknya, di Indonesia, warga Malaysia diberikan prioritas daripada warga Indonesia.

Rasa bangga sebagai bangsa Indonesia kadang-kadang tidak selalu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Berbagai wawancara menunjukkan bahwa masyara-

kat perbatasan lebih cenderung suka berobat ke kota-kota di Malaysia daripada ke Batam atau Jakarta. Itu karena jaraknya yang lebih dekat dan pelayanannya yang lebih baik. Menjadi tradisi dalam dunia kesehatan Malaysia, bahwa orang sakit yang berasal dari luar negeri dilayani dengan baik dan diprioritaskan, agar kelak di kemudian hari keluarga mereka dapat kembali lagi berobat ke Malaysia. Hal ini mungkin saja tidak berkaitan dengan rasa kebangsaan, tetapi upaya memenuhi kebutuhan dasar di mana Pemerintah Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia.

Meskipun rasa kebangsaan masyarakat perbatasan Karimun relatif masih tinggi, rasa kebangsaan warga keturunan di daerah ini masih perlu dipertanyakan. Kebanyakan informan mengatakan bahwa rasa kebangsaan warga keturunan Tionghoa masih kurang dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu indikator, misalnya, mereka lebih gemar menggunakan mata uang dolar Singapura meskipun tinggal di Karimun. Bahkan, sebelum reformasi, terutama tahun 1980-an, warga keturunan Tionghoa kebanyakan menggunakan dolar Singapura sebagai mata uang dalam setiap transaksi. Namun, sejak Reformasi 1998, mereka lebih banyak menggunakan mata uang rupiah. Hal ini memunculkan makna ganda, apakah warga keturunan Tionghoa pada masa Orde Baru tidak memiliki rasa nasionalisme atau tindakan tersebut merupakan bentuk resistensi terhadap rezim Orde Baru.

Indikator lain yang menunjukkan rendahnya rasa kebangsaan warga keturunan Tionghoa di Karimun adalah preferensi mereka untuk melihat siaran TV dari Tiongkok dan Singapura. Hal tersebut sebenarnya dapat dipahami mengingat penguasaan Bahasa Indonesia dari warga keturunan Tionghoa generasi tua tidak sebaik generasi muda. Demikian juga, kalau orang Tionghoa bertemu dengan sesama orang Tionghoa di hadapan orang Melayu-Karimun, mereka lebih suka menggunakan bahasa Tionghoa daripada Bahasa Indonesia. Bagi kebanyakan orang Jawa atau Melayu, hal ini merupakan sesuatu yang mengganggu karena seolah-olah mereka dikesualikan dalam interaksi sehingga menimbulkan rasa saling tidak percaya. Hal ini diperkuat dengan kondisi empiris dominasi ekonomi warga keturunan Tionghoa

di daerah ini. Beberapa informan dari kalangan pemerintah memperlakukan penerbitan surat kabar berbahasa Tionghoa dan pendirian kembali sekolah Tionghoa. Komunitas warga keturunan selalu menonton siaran televisi dan radio yang menggunakan Bahasa Mandarin dan bertempat tinggal di tempat yang mayoritas dihuni warga keturunan Tionghoa. Pembauran mereka masih dirasakan kurang, walaupun beberapa warga keturunan Tionghoa menikah dengan orang Melayu.

Namun, observasi menunjukkan adanya gejala nasionalisme warga keturunan Tionghoa pada masa kini mulai menguat. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya warga keturunan Tionghoa yang terjun ke politik praktis atau mendaftar sebagai pegawai negeri sipil. Fenomena ini dapat dimaknai bahwa mereka ingin berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Jumlah warga keturunan Tionghoa yang diperkirakan sekitar 15% di Karimun, menetap di daerah sepanjang pantai dan memiliki ruko yang berjajar. Sebaliknya, orang Melayu mendiami bukit-bukit yang lebih tinggi. Sementara itu, para pendatang bertempat tinggal di antara komunitas orang Melayu dan komunitas warga keturunan Tionghoa. Pola ini tidak bersifat mutlak, meskipun memperlihatkan adanya kecenderungan yang demikian. Orang Jawa membentuk kampung-kampung pemukiman seperti Bukit Tiom dan Sidareja karena sebagian besar adalah petani sehingga tinggal berdekatan. Orang Batak tinggal di Poros, sementara orang Padang cenderung berbaur.

Argumen bahwa warga keturunan Tionghoa kurang nasionalis dibandingkan dengan orang Melayu, mendapatkan banyak penolakan. Misalnya, perwira Pos Lanal TNI-AL Karimun mengemukakan bahwa warga keturunan Tionghoa cenderung berbahasa Mandarin, tetapi mereka tetap memiliki rasa kebangsaan. Beberapa siswa keturunan Tionghoa ikut dalam kegiatan Saka Bahari yang diselenggarakan TNI-AL. Para siswa tersebut mengikuti pelajaran baris-berbaris dan perkemahan akhir pekan TNI-AL. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh salah seorang aktivis mahasiswa. Ia menuturkan bahwa secara akademik, siswa keturunan Tionghoa itu memahami lebih banyak persoalan geografi dan sejarah Indonesia melalui pelajaran Sejarah, Ilmu

Pengetahuan Sosial, dan PPKn. Mereka juga terlibat sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Karimun setiap 17 Agustus.

Kebanyakan warga keturunan Tionghoa di Karimun masih kurang fasih dalam berbahasa Indonesia. Hal itu disebabkan mereka lebih banyak bergaul dengan komunitas warga keturunan Tionghoa yang jumlahnya relatif besar. Namun, pelajar keturunan Tionghoa yang berasal dari pulau-pulau di sekitar Karimun seperti Kundur, Moro, dan Buru lebih fasih berbahasa Indonesia karena berinteraksi dengan penduduk yang berbahasa Melayu dan jumlah warga keturunan Tionghoa relatif kecil di pulau-pulau tersebut. Bahkan para pelajar keturunan Tionghoa di Karimun kebanyakan tidak mengetahui nama-nama pulau di sekitarnya, termasuk Pulau Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Rasa kebangsaan para pelajar keturunan Tionghoa muncul dalam bentuk ikatan emosional. Misalnya, ketika muncul kasus konflik perebutan klaim atas Pulau Sipadan dan Ligatan, kasus klaim budaya reog oleh Malaysia, para pelajar keturunan Tionghoa ikut marah terhadap Malaysia.

Tingginya rasa kebangsaan orang Melayu di daerah Karimun dan sekitarnya dapat ditelusuri dalam sejarah Kabupaten Karimun (Swastiwi, 2001). Pada 1637, angkatan laut Kerajaan Johor di bawah Sultan Abdul Jalil Syah III berhasil menghancurkan armada Portugis di Karimun. Hal itu menandai bangkitnya Kerajaan Melayu Johor di Selat Malaka yang wilayahnya mencapai Riau. Perubahan politik terjadi pada 1784 ketika Belanda menguasai Riau dan melakukan monopoli perdagangan di daerah tersebut (Tarling, 1962). Pendudukan ini telah melemahkan pengaruh Johor terhadap Riau dan menimbulkan perdagangan gelap di Selat Malaka sebagai bentuk perlawanan terhadap monopoli perdagangan Belanda. Belanda kemudian membersihkan para pelaku pedagang gelap dan menyebut mereka perompak laut atau *lanon*. Pulau Karimun, Bintan, dan Batam pada masa lalu terkenal sebagai daerah *lanon* atau bajak laut yang mengancam keamanan Selat Malaka. Motivasi para bajak laut pada masa tersebut tidak hanya berorientasi pada ekonomi, namun sebagai ekspresi rasa patriotisme mereka berjuang melawan penjajah Belanda.

Setelah Belanda menaklukkan Kerajaan Riau-Lingga pada 1874, mantan pembesar Kerajaan Riau-Lingga mengorganisasi perlawanan terhadap Belanda dengan cara memobilisasi para *lanon*. Serangan terhadap kapal-kapal asing yang melewati Pulau Galang, Kundur, Moro, Buru, dan Karimun semakin meningkat sehingga menjadi perhatian pemerintah kolonial Inggris dan Belanda. Pada tahun yang sama, Kapal *Andromache* milik maskapai perdagangan Inggris dibajak di Perairan Pulau Galang. Kemudian Armada Inggris mengirimkan pasukannya menyerang *lanon* di Pulau Galang. Dalam kapal bajak laut tersebut ditemukan dokumen yang menjelaskan bahwa para *lanon* di sekitar Pulau Galang diorganisir oleh Pangeran Haji Abdulrahman bin Haji Idris. Ketakutan terhadap serangan Armada Inggris memaksa Sultan Riau-Lingga menyerahkan kerajaannya di bawah perlindungan Belanda. Traktat London 1824 antara Belanda dan Inggris memisahkan Kerajaan Riau-Lingga di Malaysia dengan Riau Kepulauan karena Singapura dan Semenanjung Malaya menjadi milik Inggris, sedangkan Riau di bawah Belanda (Chuan & Cleary, 2005, 101). Sejak saat itulah konsep perbatasan secara politik dan geografis muncul dan memisahkan komunitas sosial-budaya orang Melayu yang sebelumnya memiliki kerajaan dari Riau sampai Johor.

UPAYA PEMELIHARAAN NASIONALISME NEGARA

Rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang bersifat *taken for granted* atau terjadi dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang secara sosial dan politik dikonstruksi oleh institusi-institusi negara melalui proses sosial, yakni upaya-upaya pemeliharaan nasionalisme. Nasionalisme ditanamkan oleh aparat-aparat ideologi negara terhadap masyarakat dengan menggunakan ritual-ritual nasionalisme. Ritus-ritus dalam masyarakat tradisional, menurut Durkheim (1967), bertujuan meningkatkan solidaritas dan integrasi sosial yang dilakukan melalui penciptaan simbol-simbol tertentu. Sebagaimana sebuah ritus dalam masyarakat tradisional, upaya pemeliharaan nasionalisme dilakukan secara berulang-ulang dan diinstitutionalisasi.

Lembaga-lembaga negara telah melakukan upaya yang sistematis dan terencana untuk mengajarkan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Institusi pendidikan dari SD sampai SMA, dalam perspektif Gramsci (1971), merupakan salah satu instrumen negara untuk menanamkan ideologinya terhadap masyarakat sipil. Praktik-praktik tersebut secara sosiologis dapat dilihat sebagai ritus-ritus nasionalisme, yang didefinisikan secara teoretis sebagai upacara-upacara menggunakan simbol-simbol untuk menggalang solidaritas suatu kelompok dan sekaligus menjaga integrasi sosial. Implikasi ritus-ritus nasionalisme seperti ini adalah penanaman pengetahuan masyarakat tentang Indonesia yang dipahami dalam konsepsi politik, yaitu NKRI dan simbol-simbolnya.

Upaya pemeliharaan rasa kebangsaan masyarakat perbatasan di Karimun dilakukan melalui institusi pendidikan dasar, yakni pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN) yang diajarkan kepada siswa sejak kelas IV Sekolah Dasar. Pada masa Orde Baru, materi-materi pada mata pelajaran ini diajarkan melalui Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Mata pelajaran ini menjadi penting di daerah-daerah perbatasan karena budaya dari luar negeri menimbulkan efek negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, misalnya anak-anak muda sudah tidak menghormati nilai-nilai agama dan adat-istiadat. Generasi muda kebanyakan mengadopsi dan mengikuti gaya hidup seperti yang diperlihatkan oleh media televisi, misalnya kurang menghormati orangtua dan mengikuti gaya hidup hedonisme. Selain persoalan moral, mata pelajaran PPKN mengajarkan Wawasan Nusantara, NKRI, dan lain-lain. Penanaman semangat kebangsaan juga dilakukan di sekolah-sekolah melalui upacara bendera yang diwajibkan setiap hari Senin dengan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Tradisi upacara bendera ini lebih banyak dilakukan di daerah perbatasan daripada di Jawa—yang hanya dilakukan sekali dalam sebulan. Sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah juga dilakukan aparat TNI dan kepolisian yang sering kali mengunjungi dan berdiskusi dengan anak-anak sekolah di daerah perbatasan dengan topik keamanan lingkungan, narkoba, dan kebangsaan.

Upaya lain untuk meningkatkan rasa nasionalisme warga di daerah perbatasan adalah melalui acara-acara seremonial, terutama peringatan HUT kemerdekaan RI pada setiap tanggal 17 Agustus. Baik dengan cara upacara resmi maupun karnaval yang dilakukan di setiap desa dan kecamatan di daerah perbatasan. Misalnya, warga desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, selalu melakukan karnaval budaya setiap tanggal 17 Agustus dengan mengenakan pakaian adat dari seluruh provinsi di Indonesia. Acara-acara populer seperti ini juga dirayakan oleh masyarakat di tempat lain yang memiliki sifat menghibur sekaligus mengenang perjuangan para pendiri negara. Terlepas dari sifatnya yang dimobilisasi aparat pemerintah, tradisi peringatan kemerdekaan ini sedikit banyak telah menanamkan pentingnya rasa kebangsaan masyarakat perbatasan.

Pemerintah di daerah perbatasan juga berperan dalam memelihara rasa kebangsaan warga meskipun masih bersifat formalistik, elitis, dan artifisial. Kepala bidang Kesbang Kabupaten Karimun menuturkan bahwa Bidang Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun memiliki tiga program utama untuk membangun rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan. Ketiga program itu meliputi pendidikan wawasan kebangsaan, pendirian Forum Pembinaan Kebangsaan untuk menjaga kerukunan antarsuku bangsa dan agama, dan mengembangkan kerja sama dengan Dinas Perdagangan untuk kampanye mencintai produksi dalam negeri.

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) adalah suatu komite yang diketuai oleh Sekda, beranggotakan Polres dan tokoh-tokoh keagamaan. Komite bertujuan untuk memajukan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda, terutama mahasiswa dan pelajar. Pembentukan komite ini bersifat *top down*, yakni menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri 71/2011 tentang PWK. Kegiatannya berupa seminar pembelajaran dari guru PPKN, pemutaran video tentang perlunya pembangunan SDM, SDAL, dan sejarah. Kurikulum pendidikan wawasan kebangsaan yang pada masa Orde Baru jauh lebih baik dengan adanya pendidikan budi pekerti, PMP, dan PSPB sehingga jiwa kebangsaan pada masa

lalu jauh lebih tinggi daripada anak-anak generasi masa sekarang. Perbedaan kurikulum tersebut berimplikasi pada semakin hilangnya secara gradual emosi generasi muda pada romantisme sejarah kebangsaan. Sebagai contoh, siswa masa kini kebanyakan tidak tersentuh emosinya ketika menyanyikan lagu kebangsaan. Kurikulum PWK setelah reformasi yang hanya mencakup PPKN dan pendidikan sejarah dinilai kandungannya kurang mendorong rasa nasionalisme. Bahkan, generasi muda di daerah perbatasan cenderung lebih tertarik pada isu-isu transnasional yang mereka dapatkan melalui media internet.

Forum Pembinaan Kebangsaan (FPK) yang didirikan pada 2012 merupakan wadah informasi yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai organisasi suku bangsa dan keagamaan. Tugasnya membantu pemerintah mewujudkan kerukunan hidup di Kabupaten Karimun. Dewan FPK terdiri atas Kodim, Polres, Lanal, BIN, dan Kejari. SKPD terdiri atas BPM dan Kesbang, Sosial, Pendidikan, Badan Kesra, dan Ekonomi, serta 4 orang wakil masyarakat yang mewakili 22 organisasi kesukuan dan OKP. Program kegiatan FPK adalah kerja bakti membersihkan lingkungan di Sungai Lahan Barat, Karimun, diikuti masyarakat RT/RW, polisi, dan TNI. Selain itu, FPK juga mengadakan program Sabtu Besar bersama SKPD dan kelompok-kelompok masyarakat membersihkan taman di *coastal areas* pada hari Sabtu pagi. Selanjutnya adalah pembuatan spanduk yang mengimbau masyarakat agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjelang Pemilu 2014. Dalam konteks ini, penanaman rasa kebangsaan dilakukan melalui mobilisasi partisipasi Ormas dan OKP dalam kegiatan-kegiatan besar pemerintah dan upacara kenegaraan, seperti peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kemerdekaan, Pahlawan, dan Hari Kebangkitan Nasional.

Upaya Pemda Karimun dalam meningkatkan rasa cinta tanah air adalah dengan cara mendorong masyarakat lebih mencintai produk-produk dalam negeri, yakni produk dari masyarakat Karimun sehingga tidak perlu lagi berbelanja ke Kukup, Malaysia—yang produknya berasal dari luar negeri. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kecenderungan masyarakat Karimun lebih suka membeli komoditas makanan dari Malaysia

karena kemasannya yang lebih menarik. Selain itu, pemerintah juga mendorong warga untuk bekerja di dalam negeri dengan memberikan mereka pelatihan teknis tertentu. Namun, upaya tersebut tidak berjalan dengan baik. Kebanyakan warga perbatasan Karimun baru bekerja di daerahnya sendiri pada masa sekarang karena banyak investor asing datang ke daerah ini setelah daerah ini menjadi *Free Trade Zone*. Program PNPM Mandiri yang memberdayakan masyarakat petani dan nelayan menyebabkan mereka tidak perlu bekerja di Malaysia.

Pada tataran mikro, pejabat daerah sering kali terlibat langsung dalam pembinaan rasa kebangsaan warganya. Misalnya, seorang camat di daerah ini sering melakukan penyuluhan kepada warganya yang baru pulang dari Malaysia. Camat tersebut mengatakan, “Silakan mencari uang sebanyak-banyaknya di Malaysia, kirim uang itu ke Indonesia dan jangan lupa bahwa kamu masih warga negara Indonesia.” Dalam pertemuan-pertemuan resmi yang melibatkan camat, disarankan untuk memperengarkan lagu-lagu wajib sehingga rasa kebangsaan warga perbatasan tetap terjaga.

Upaya pemeliharaan rasa kebangsaan di daerah perbatasan juga dilakukan oleh TNI AL secara intensif dan berkelanjutan melalui program nasional cinta bahari lewat lima kegiatan. *Pertama*, latihan selam olah raga cinta bahari oleh para pemuda dan pelajar. Kegiatan ini melibatkan lebih kurang 50 orang pemuda dijadikan sebagai sarana untuk membina rasa nasionalisme. *Kedua*, membina organisasi kepanduan, Saka Bahari, yang diikuti 30 orang pemuda. Mereka dibina untuk menjadi relawan pengamanan laut di sepanjang pantai. Anggota Saka Bahari terdiri atas pelajar SMA, alumni SMA yang telah lulus, pemuda, dan lain-lain. Materi yang diajarkan mencakup pelajaran baris-berbaris, pengetahuan tentang pelayaran dan keterlibatan dalam pelayaran nusantara yang diselenggarakan oleh angkatan laut. Pada 2013, sebanyak 20 orang anggota Saka Bahari dari Karimun mengikuti Pelayaran Nusantara ke Raja Ampat, Papua. *Ketiga*, adanya program Pemuda Bahari, program khusus perkemahan pemuda bahari di Jakarta yang diikuti oleh 30 pelajar dari Karimun.

Keempat, kompetisi bola voli se-Kabupaten Karimun pada hari peringatan pembentukan Kabupaten Karimun. Kompetisi dilakukan untuk mendekatkan Angkatan Laut dengan masyarakat Kabupaten Karimun. Kompetisi ini diikuti oleh empat klub voli se-Kepulauan Riau. *Kelima*, program penanaman pohon bakau dan rehabilitasi pantai di Pulau Tulang, Karimun. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang sebelumnya dilakukan di Pulau Papan, Leho, Kilang. Tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan masyarakat cinta bahari. Kegiatan-kegiatan ini penting menurut TNI-AL karena daerah perbatasan sangat rentan secara sosial politik. Perlu dilakukan pembinaan terhadap pemuda-pemuda yang tinggal di perbatasan agar rasa nasionalisme mereka tinggi.

Upaya pemeliharaan rasa kebangsaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan TNI-AL, namun juga kelompok-kelompok warga yang tergabung dalam organisasi non-pemerintah, seperti Komunitas Merah Putih yang bergerak di wilayah Provinsi Riau Kepulauan. Komunitas Merah Putih terdiri atas pelajar, mahasiswa, dan pemuda Kepulauan Riau di Tanjung Pinang yang memiliki perhatian terhadap penanaman wawasan kebangsaan di daerah perbatasan. Komunitas ini berupaya memajukan daerah perbatasan dan memberikan motivasi kepada pemerintah agar terpacu untuk membangun daerah perbatasan. Kegiatan komunitas dilakukan dalam bentuk seminar dan pengajaran wawasan kebangsaan di daerah perbatasan, termasuk Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, dan Pulau Karimun Anak. Sasaran kegiatan komunitas ini adalah pelajar. Materi yang diajarkan adalah pemahaman terhadap wawasan kebangsaan.

Pada saat ini, kebanyakan anak-anak dari suku laut di Karimun telah belajar di sekolah dan mengetahui Indonesia dengan lebih baik. Ketika ditanyakan oleh Komunitas Merah Putih mengenai Pancasila dan UUD 1945, mereka menjawab pernah mendengarnya, tetapi tidak memahami maknanya. Menurut orang suku laut, garis batas laut internasional tidak diketahui secara pasti, namun pernah mendengar bahwa di situ sebagai daerah perbatasan. Tidak satu pun dari mereka yang mengetahui secara pasti di mana garis batas laut internasional karena tidak menggunakan dan memiliki teknologi GPS. Komunitas Merah Putih

merekomendasikan Pemerintah Daerah bahwa penanaman wawasan kebangsaan hendaknya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan orang suku laut yang tinggal di pulau-pulau terluar. Misalnya, melalui pendidikan agar anak-anak suku laut lebih diperhatikan dengan menyediakan sekolah dari SD sampai SMA, diadakan transportasi laut yang memadai untuk mengangkut anak-anak tersebut dari pulau-pulau terluar ke pulau terdekat yang sudah memiliki sekolah. Selain itu, agar komunitas suku laut diberikan fasilitas transportasi laut yang memudahkan mereka berobat ke Puskesmas di pulau terdekat. Wawasan kebangsaan terus-menerus disampaikan di daerah yang sangat membutuhkannya, seperti Pulau Karimun Anak. Dengan cara ini diharapkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat perbatasan akan meningkat, demikian pula dengan rasa kebangsaan.

Selain organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi juga berperan dalam pembinaan wawasan kebangsaan. Dalam konteks ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Karimun ikut berpartisipasi aktif bersama Pemerintah Daerah dan TNI-AL. Misalnya, ikut menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk membina nasionalisme, seperti seminar wawasan kebangsaan. BEM berpartisipasi dalam sosialisasi wawasan kebangsaan dan sejarah Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemda Karimun. Kegiatan tersebut diselenggarakan di atas kapal yang berlayar mengelilingi Kabupaten Karimun. Para pembicara terdiri atas para pejabat Pemda, TNI-AL, dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Mereka mengenalkan nama-nama selat, tanjung, teluk, dan pulau-pulau serta pulau terluar di Karimun.

Sejatinya, rasa cinta tanah air di daerah perbatasan tidak diikuti oleh indoktrinasi terhadap wawasan kebangsaan yang masif. Salah satu gagasan yang muncul adalah menghidupkan kembali Pendidikan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) seperti yang diselenggarakan rezim Orde Baru. Selain itu, hendaknya pembangunan sosial ekonomi tidak hanya terfokus di Pulau Jawa dan DKI Jakarta saja. Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) sekarang ini kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat perbatasan karena hanya memperhitungkan jumlah penduduk. Seharusnya faktor

geografis juga dimasukkan. Misalnya di Provinsi Riau Kepulauan, jarak antara Kota Tanjung Pinang dan Jakarta sama dengan jarak dari Kota Tanjung Pinang ke Natuna. Namun, perhitungan DAU hanya berdasarkan luas wilayah daratan sehingga pembagian DAU Kabupaten Natuna sangat kecil. Demikian juga, wilayah Provinsi Kepri yang hanya memiliki 4% wilayahnya darat mendapatkan alokasi DAU lebih kecil.

Pertanyaannya sekarang, sejauh mana upaya pemeliharaan nasionalisme di daerah perbatasan masih relevan dan diperlukan oleh masyarakat. Pemeliharaan nasionalisme diletakkan dalam konteks negara sejahtera di mana kedaulatan negara bergantung pada upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat (Nurdin, 2011, 21). Rasa kebangsaan masih diperlukan dan harus ditingkatkan di daerah-daerah perbatasan. Nasionalisme harus ditanamkan agar masyarakat perbatasan lebih mencintai Indonesia sebagai entitas politik atau kebudayaan. Penanaman nilai-nilai dan rasa cinta tanah air seharusnya diikuti oleh pengenalan geografi dan kebudayaan Indonesia agar pelajar dan anggota masyarakat lain dapat ikut merasakan makna keindonesiaan.

NASIONALISME DALAM PEMAKNAAN MASYARAKAT

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, nasionalisme dan rasa kebangsaan yang dibahas adalah pemaknaan yang didefinisikan oleh negara. Misalnya bahwa nasionalisme identik dengan pengetahuan dan rasa cinta terhadap NKRI. Menjadi tugas aparat negara untuk menyosialisasikan ideologi nasionalisme melalui mobilisasi partisipasi warga negara. Namun, kadang-kadang pemaknaan terhadap rasa kebangsaan yang disosialisasikan hanya sebatas artifisial. Ketidakmampuan pemerintah mengatasi persoalan-persoalan di daerah perbatasan, seperti pendidikan dan kesehatan dasar, transportasi, ketersediaan BBM, menjadikan diskursus nasionalisme dipertanyakan.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah masyarakat di perbatasan memahami, memaknai, dan menggambarkan konsep nasionalisme Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang awam, yang sebagian besar berpendidikan

menengah ke bawah, memaknai esensi nasionalisme sebagai tersedianya lapangan kerja dan tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, hakikat nasionalisme juga berupa tersedianya akses pendidikan dan kesehatan bagi warga yang tinggal di pulau-pulau terpencil. *Gap analysis* dalam bagian ini menunjukkan bahwa nasionalisme yang dipahami secara politik akan menemukan maknanya jika diimplementasikan dalam kehidupan sosial ekonomi.

Dalam perspektif kebanyakan mahasiswa di Karimun, Indonesia merupakan negara dengan kebhinnekaan kelompok suku bangsa dan agama, di mana orang Melayu adalah salah satu unsur yang membentuk Indonesia. Nasionalisme adalah upaya mencintai Indonesia yang dilakukan dengan membangun desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara mereka. Perspektif nasionalisme seperti ini berpusat pada akar masyarakat, yaitu pedesaan. Dalam konteks Karimun berarti pembangunan masyarakat pesisir. Upaya membangun keindonesiaan haruslah dimulai dari membangun pendidikan karakter generasi muda agar mereka memahami Pancasila sebagai sendi dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembangunan sektor pendidikan secara luas adalah kata kunci dan makna utama nasionalisme kontemporer.

Nasionalisme pada masa kini harus dimaknai sebagai upaya meneruskan perjuangan para *founding fathers* dengan cara mengisi pembangunan, memerangi kemiskinan dan kebodohan. Salah seorang informan, guru SD di TBK, Zaenuddin, menuturkan bahwa sekarang adalah era perang melawan ketertinggalan ekonomi dan pendidikan agar harkat dan martabat orang tempatan dihargai. Walaupun kebanyakan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia rata-rata mendapatkan 3000 ringgit atau 10 juta rupiah per bulan, dan mampu mengirimkan ke keluarganya di Indonesia 1000 ringgit per bulan, tetapi jarang orang Karimun bekerja di Malaysia dengan gaji sebesar itu. Orang Karimun pada umumnya bekerja musiman selama satu bulan jika tidak bisa bekerja sebagai nelayan dan petani di kampungnya. Rata-rata setiap orang Karimun memiliki saudara atau kerabat yang tinggal di Malaysia, di mana saudaranya menikah dengan orang Malaysia. Bahkan, sebelum tahun

1980, orang Karimun yang bekerja di Malaysia diberikan kemudahan oleh Pemerintah Malaysia memperoleh IC (*Identity Card*).

Nasionalisme di perbatasan diwujudkan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus memperkuat pertahanan nasional. Sebagai bentuk ekspresi rasa kebangsaan, Pemda merencanakan reklamasi pantai dan pendalaman alur laut agar kapal-kapal besar merapat dan bersandar di TBK sehingga Pendapatan Asli Daerah dan dana pembangunan sosial ekonomi meningkat. Namun, rencana ini dilarang Departemen Perhubungan karena melanggar peraturan pemerintah tentang RTRW hutan lindung sekaligus berpotensi melanggar garis batas internasional. Sebagian pejabat Pemerintahan Kabupaten Karimun menganggap pemerintah pusat belum memiliki rasa kebangsaan dengan melarang daerah untuk membangun kekuatannya. Konsep perbatasan sebagai beranda depan masih mendapatkan kendala banyaknya kebijakan Pemerintah Pusat yang belum mendukungnya. Sebagai contoh, peraturan kawasan hutan lindung tidak memperbolehkan perluasan kawasan industri dan pemukiman sehingga solusi kebijakan yang dipilih Pemda Karimun adalah melakukan reklamasi pantai. Sementara, reklamasi pantai juga dilarang oleh Pemerintah Pusat karena daerah reklamasi merupakan hutan mangrove yang berfungsi menjaga ekosistem laut. Pemda Karimun berpandangan bahwa undang-undang nasional seharusnya tidak diberlakukan secara seragam, tetapi harus memperhatikan kondisi daerah yang berbeda satu dengan yang lain.

Walaupun masih terdapat kendala dalam pembangunan sosial ekonomi daerah perbatasan, sebagian besar informan menyetujui bahwa nilai-nilai kebangsaan dan identitas nasional harus tetap ditanamkan kepada masyarakat. Nasionalisme dapat dimaknai sebagai kehidupan yang harmonis dan toleran yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan. Pada tataran praktis, seharusnya ada upaya untuk menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan secara luas, meningkatkan kerja sama antaretnis, dan menyelesaikan ketegangan-ketegangan antaretnis. Tingkat toleransi antarkelompok etnis dan agama di Karimun masih cukup tinggi, dan mayoritas penduduk (80%) adalah Melayu-Muslim. Forum

Persatuan Kebangsaan (FPK) telah dibentuk sebagai alat meningkatkan pembauran antarkelempok etnis, dan menjaga kerukunan. Namun, sosialisasi identitas nasional ini tidak akan efektif kalau urusan ekonomi belum selesai. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, barulah orang memikirkan dan memperjuangkan persoalan identitas. Tingkat partisipasi masyarakat dalam upacara besar seperti karnaval bukan ukuran partisipasi, tetapi merupakan hasil mobilisasi. Pendidikan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila perlu diselenggarakan kembali untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan membangun karakter, budi pekerti, atau jati diri bangsa.

Hasil wawancara dengan sejumlah informan menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan rasa kebangsaan dan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan harus diikuti upaya mewujudkan kesejahteraan. Daerah perbatasan pada umumnya adalah daerah tertinggal dalam pembangunan dan kesejahteraan masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, nasionalisme kurang menjadi bermakna ketika kesenjangan antara cita-cita kemerdekaan dan realitas masih cukup besar. Yang dibutuhkan oleh masyarakat perbatasan adalah kemudahan akses terhadap pemanfaatan sumber daya dan kesejahteraan. Misalnya, harus disediakan barang-barang dari Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada masa lalu, komoditas yang diperdagangkan di Karimun sangat tergantung dari Malaysia dan Singapura. Momen yang sangat penting adalah ketika Karimun menjadi kabupaten dan Kepri menjadi provinsi, dan barang-barang serta komoditas perdagangan dari Indonesia masuk ke kawasan ini, misalnya beras, sabun, dan obat-obatan.

Sosialisasi wawasan kebangsaan yang bersifat *top down* sering kali belum efektif untuk memelihara rasa kebangsaan. Menurut pandangan aktivis organisasi non-pemerintah, sosialisasi dari anggota DPD RI dan DPR RI tentang empat pilar kebangsaan dilakukan beberapa kali di TBK dan Kecamatan Kundur pada 2013. Akan tetapi, respons masyarakat belum terlalu antusias. Hal tersebut terlihat dari sedikitnya peserta yang bertanya sesudah ceramah di kampus dan kantor kabupaten yang mengundang tokoh-tokoh

masyarakat. Masyarakat kecil yang tinggal di perbatasan tidak membutuhkan sosialisasi wawasan kebangsaan karena bagi mereka pemenuhan kebutuhan dasar haruslah diprioritaskan. Masalahnya, apakah pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan mampu menaikkan taraf hidup rakyat. Dengan demikian, pemerintah disarankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di perbatasan daripada menyosialisasikan empat pilar kebangsaan.

Masih banyak suku-suku laut di Karimun yang hidup dalam situasi keterbatasan dan belum diperhatikan dengan serius oleh pemerintah. Misalnya, suku bangsa Duane di Kundur dan orang Mantang di Meral Barat yang taraf ekonominya sangat rendah. Suku bangsa Duane bekerja memulung sampah, mengumpulkan plastik bekas, bekerja sebagai buruh pelabuhan, dan mencuci pakaian. Mereka pada umumnya orang-orang laut yang dipindah ke daratan. Penduduknya ada yang sekolah, tetapi tidak sampai ke tingkat SMP. Selesai SD, mereka bekerja mencari uang membantu orangtuanya karena secara ekonomi mereka sangat kekurangan. Baru sekarang ini ada perhatian dari pemerintah berupa bantuan pembangunan rumah dan beasiswa pendidikan. Suku Laut yang menetap di Pulau Karimun Anak juga mengalami nasib yang sama, perekonomian mereka belum sejahtera. Kalau diajak berbicara wawasan kebangsaan, mereka mengalami kesulitan untuk meresponsnya. Tetapi kalau diajak berbicara tentang masalah uang, mereka mengerti dengan cepat. Demikian juga situasi Suku bangsa Mantang yang menetap di Desa Teluk Stimbul, Kecamatan Meral Barat. Kondisi kesehatan masyarakatnya sangat memprihatinkan karena belum ada Puskesmas dan Posyandu di daerah tersebut. Mereka harus pergi ke Meral Barat yang jaraknya dua puluh kilometer atau ke Puskesmas Tebing dan Tanjung Balai dengan menempuh jalan darat. Anak-anak dari suku ini banyak yang belum bersekolah karena tidak ada SD di daerah tersebut. Untuk bersekolah, mereka harus pergi ke desa lain yang sangat sulit dijangkau, baik melalui jalur darat maupun laut.

Free trade zone di Karimun selama ini diduga belum menguntungkan masyarakat lokal karena lebih banyak menyerap tenaga kerja terampil

dari luar Karimun. Sementara untuk penggunaan bahan-bahan baku industri—seperti besi dan baja—perusahaan-perusahaan asing di Karimun lebih memilih impor dari Malaysia dan Singapura. Hal itu karena besi baja buatan Indonesia yang diproduksi Krakatau Steel di Cilegon dan Medan tidak memenuhi syarat. Walaupun banyak investor asing yang masuk ke Pulau Karimun, penyerapan tenaga kerja belum maksimal karena tidak ada MoU antara Pemda dan perusahaan asing untuk menyerap tenaga lokal. Penerimaan pajak dan retribusi untuk Pemda sangat kecil jumlahnya sehingga tidak menyumbang banyak untuk PAD. Dampak lain adalah pembangunan ekonomi hanya terjadi di Pulau Karimun dan tidak merata di kecamatan pulau lainnya seperti Kundur, Durai, Moro, dan Buru. Pulau Buru tidak memiliki bahan tambang, persediaan ikan yang melimpah, dan tanahnya tidak subur. Sementara Pulau Moro memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, namun belum dikelola dengan baik. Pelabuhan yang dibangun pemerintah tidak menggunakan perencanaan yang baik. Kapal dari Batam ke Karimun belum dapat singgah di Pulau Moro karena letaknya yang tidak segaris dalam perjalanan kapal dari Batam ke Karimun. Sebagian besar jalan di kecamatan pulau ini belum diaspal, fasilitas Puskesmas juga belum lengkap, dan SD belum ada di setiap desa yang dibatasi oleh laut. Kemiskinan masih cukup tinggi di Kecamatan Moro dan Buru sehingga sebagian penduduknya bekerja di Malaysia sebagai pekerja musiman.

Orang Karimun tetap menyatu dalam wadah NKRI, namun masyarakat masih kuat untuk mengikuti tradisi budaya Melayu. Silaturahmi masih cukup kuat di kalangan orang Melayu, baik antara orang yang tinggal di Indonesia maupun dengan mereka yang tinggal di Malaysia. Walaupun secara politik sudah berbeda negara, secara sosial budaya masih tetap satu sebagai masyarakat serumpun. Dibandingkan dengan sebelum pemekaran provinsi dan pemekaran kabupaten, Karimun sangat jauh dari Pekanbaru dan tidak diperhatikan pembangunannya. Namun sesudah pemekaran 1999, pelayanan pendidikan ditingkatkan. Pada masa lalu, pendidikan masyarakat belum berkembang karena jumlah SD, SMP, dan SMA serta perguruan tinggi di wilayah ini sangat

terbatas. Pada masa kini, SMAN Tanjung Balai sudah bisa mendapatkan rata-rata NEM tertinggi di Kepri. Salah satu SMP di Kundur menyumbang siswa terbaik Kepri. Bahkan SMA Tanjung Batu sekarang ini mewakili Provinsi Kepri untuk mengikuti lomba cerdas cermat tingkat nasional. Dengan demikian, tingkat pendidikan dan ekonomi Kabupaten Karimun lebih baik dibanding sebelum pemekaran.

Rasa kebangsaan dapat ditanamkan dengan mengusulkan pemerintah untuk berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah harus memberikan perhatian agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Esensi nasionalisme adalah kesejahteraan bagi masyarakat kecil. Menjaga rasa kebangsaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan tidak berbunyi di masyarakat. Yang sudah berpendidikan mungkin akan mengerti konsep ini, namun bagi mereka yang belum sejahtera, wawasan kebangsaan sebagai konsep, perlu dipertanyakan.

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat perbatasan terhadap Indonesia sebagai negara modern yang mempunyai perbatasan laut serta kebanggaan nasional sebagai orang Indonesia semakin meningkat dibandingkan dengan pada masa 1970-an. Hal itu karena perkembangan teknologi informasi dan penanaman rasa kebangsaan masa Orde Baru. Namun, masih terjadi kesenjangan antara pengetahuan tentang Indonesia sebagai negara modern yang memiliki batas-batas teritorial tertentu dan praktik-praktik sosial yang merepresentasikan rasa kebangsaan, misalnya *smuggling* dan *illegal activities*. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan kehidupan ekonomi mereka yang masih tertinggal dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di seberang perbatasan.

Pemerintah telah berupaya menanamkan semangat kebangsaan dan nasionalisme kepada masyarakat perbatasan melalui berbagai program. Namun, temuan lapangan mengindikasikan nasionalisme yang didefinisikan dan secara politik dikonstruksi oleh negara, diukur dengan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, belum

berbunyi dalam realitasnya. Atau bisa dikatakan kurang relevan dengan konteks sosial ekonomi masyarakat perbatasan. Dengan kata lain, pemeliharaan rasa kebangsaan melalui ritus-ritus nasionalisme belum diikuti upaya pemeliharaan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Upaya pemeliharaan rasa kebangsaan dapat dilakukan dengan mengakomodasi dan memberikan ruang bagi perkembangan identitas dan kebudayaan masyarakat perbatasan dalam bingkai rumah Indonesia.

Martinez (1994) mengklasifikasikan empat tipe wilayah perbatasan berdasarkan konteks sejarahnya, yaitu *alienated borderland* (tidak terjadi aktivitas lintas batas), *coexistent borderland*, *interdependent borderland* (saling bergantung), dan *integrated borderland* (daerah perbatasan yang terintegrasi). Merujuk pada pandangan Martinez, hubungan antara Indonesia dan Malaysia atau Indonesia dengan Filipina dapat dilihat sebagai *interdependent borderland*, yakni hubungan saling tergantung. Sebagai contoh, Malaysia menyediakan lapangan kerja, sedangkan Indonesia menyediakan tenaga kerja. Dalam hubungan yang saling bergantung ini, nasionalisme di daerah perbatasan relatif masih kuat secara politik, namun keterikatan dalam hubungan ekonomi dan kultural juga sama kuatnya.

BIBLIOGRAFI

- Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J. & Sanford, R. N. (1969). *The authoritarian personality*. New York: W.W. Norton Company.
- Anderson, B. (1991). *Imagined communities: Reflection on the origin and spread of nationalism*. London: Verso.
- Bakker, R. (2012). *Pembinaan nasionalisme generasi muda di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste melalui pendidikan kewarganegaraan*. Disertasi doktor, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Chuan, G. K. & Cleary, M. (2005). *Environment and development in the straits of Malacca* (Vol. 10). Routledge.
- Coenders, M. (2001). *Nationalistic attitudes and ethnic exclusionism in a comparative perspective: an empirical study toward the country and ethnic immigrants in 22 countries*. Doctoral dissertation, Catholic University Nijmegen, 2001.

- Durkheim, E. (1967). *The elementary of the religious life*. New York: Free Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci: Ed. and Transl. by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith*. G. Nowell-Smith, & Q. Hoare (Eds.). International Publishers.
- Hayase, S Non, D. M. & Ulaen, A. J. (1999). *Silsilah/tarsilas and historical narratives in Sarangani bay and Davao gulf regions, South Mindanao, Philippines, and Sangihe-Talaud Islands, North Sulawesi, Indonesia*. Kyoto: Center for South-east Asian Studies, Kyoto University.
- Kleinpenning, G. & Hagendoorn, L. (1993). Forms of racism and the cumulative dimension of ethnic attitudes. *Social Psychology Quarterly*, 56, (1), 21–36.
- Lapian, A. B. (2003). Pengantar. Dalam A. J. Ulaen, *Nusa Utara: dari lintasan niaga ke daerah perbatasan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lapian, A. B. (2009). *Orang laut, bajak laut, raja laut. Sejarah kawasan Laut Sulawesi abad XIX*. Komunitas Bambu. Jakarta: EFEO, KITLV, ANRI, UGM, dan UNPAD.
- Latcheva, R. (2010). Nationalism versus patriotism, or the floating border? National identification and ethnic exclusion in post-communist Bulgaria. *Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology*, 1 (2), 187–216.
- Martinez, O. J. (1994). *Border people: Life and society in the US-Mexico borderland*. Tucson: University of Arizona Press.
- Marx, K. (1844). On the Jewish questions. In Andy Blunden & Matthew Grant dalam *Deutsch-Französische Jahrbücher*. Diakses dari www.marxist.org diakses pada 30 Juni 2008.
- Nainggolan, P. P (eds.). (2004). *Batas wilayah dan situasi perbatasan Indonesia: ancaman terhadap integritas teritorial*. Jakarta: Tiga Putra Utama.
- Nilasari, F. D., Suprihatini, T., Lukmantoro, T., & Widagdo, M. B. (2014). Representasi nasionalisme warga perbatasan Kalimantan Barat dalam film (Analisis Semiotika pada Film Tanah Surga... Katanya). *Interaksi Online*, 3(3), e-journal Universitas Diponegoro.
- Noor, F. (2013). Negara dan kedaulatan politik. Dalam M. Noveria (ed.), *Kedaulatan negara di wilayah perbatasan: Tinjauan multidimensi* (pp. 97–138). Jakarta: PPK-LIPI.
- Nurdin, M. F. (2011). *Kedaulatan di wilayah perbatasan: perspektif kesejahteraan sosial*. Bandung: Puslitbang KPK LPPM Unpad.
- Parengkuan, F. E. W. (1984). *Sejarah dan kebudayaan lima suku bangsa asli di Sulawesi Utara*. Manado: Fakultas Sastra, Universitas Sam Ratulangi.
- Rarahita, M. N. (2013). *Pemaknaan nasionalisme pada masyarakat Kalimantan Timur di wilayah perbatasan Malaysia dalam foto cerita jurnalistik. analisis semiotika foto cerita jurnalistik tentang semangat nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dalam media online www. antarafoto.com*. Disertasi doktor pada Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta (UAJY).
- Suparlan, P. (2002). Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. *Jurnal Anthropologi Indonesia*, 69, 16–21.
- Swastiwi dkk. (2001). *Sejarah daerah Karimun*. Tanjung Balai Karimun: Dinas Pendidikan.
- Tarling, N. (1962). *Anglo-Dutch rivalry in the Malay world 1780–1824*. St Lucia: University of Queensland Press.
- Tagliocozzo, E. (2005). *Secret trades, porous borders: smuggling and states along a Southeast Asian frontier 1865–1915*. New Haven & London: Yale University Press.
- Tirtosudarmo, R. (2005). Wilayah perbatasan dan tantangan Indonesia abad 21. Dalam R. Tirtosudarmo & J. Habba (eds), *Dari Entikong sampai Nunukan* (pp.1–14). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Todosijevic, B. (1998). *Relationships between authoritarianism and nationalist attitudes*. Paper presented at symposium: Authoritarianism and prejudices in an international and inter-generational perspective, CEU (Central European University), Budapest). http://www.personal.ceu.hu/students/98/Bojan_Todosijevic/ENYEDI/OSIRIS1.pdf (Diakses 10 November 2010)
- Ulaen, A.J., Wulandari, T. & Tangkilisan, Y.B.T. (2012). *Sejarah wilayah perbatasan Miangas-Filipina 1928–2010; Dua nama satu juragan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Wadley, R. L. (2002). Border studies beyond Indonesia: A comprehensive perspective. *Jurnal Antropologi Indonesia*, XXVI, 67, 1–11.